



ketentuan pada aspek kepemilikan, karena objek jual beli merupakan benda *muhtarām* (benda milik umum yang haram dimiliki) yang sedang dilindungi oleh negara dalam bentuk perundang-undangan, yaitu undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya No. 5 tahun 1990 dan peraturan menteri kehutanan dan perkebunan no 733/kpts-ii/1999 tentang perlindungan lutung Jawa sebagai satwa liar. Kemudian hukum Islam memandang praktik ini juga tidak memenuhi aspek ketaatan pada pemerintah dan sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayat hukum surah Annisaayat 59. Jadi praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan peliharaan dalam perspektif hukum Islam adalah tidak sah hukumnya.

